



Sustainability Reporting dan Tax Avoidance: Peran Moderasi Dewan Direksi Wanita

***Thia Margaretha
Tarigan**

Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya Jakarta,
Indonesia

**Christianus Yudi
Prasetyo**

Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya Jakarta,
Indonesia

**Andang Wirawan
Setiabudi**

Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya Jakarta,
Indonesia

***Corresponding author:**

Thia Margaretha Tarigan, Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya Jakarta, Indonesia.

✉thia.margaretha@atmajaya.ac.id

Article Info :

Article history:

Received: May 04, 2026

Revised: June 15, 2026

Accepted: June 17, 2026

Keywords:

Female Board of Directors;
Sustainability Reporting; Tax
Avoidance

Kata Kunci:

Dewan Direksi Wanita; Pelaporan
Keberlanjutan; Penghindaran Pajak

Abstract

Background: Tax avoidance remains a global concern because it weakens state fiscal capacity and corporate accountability. In Indonesia's energy sector, complex financial structures and regulatory gaps may increase firms' exposure to aggressive tax strategies. Although sustainability reporting is expected to enhance transparency and reduce such practices, its effectiveness may depend on corporate governance characteristics, particularly the presence of women among corporate directors.

Objective: This research analyzes how sustainability reporting on tax avoidance while testing whether female directors moderate this association.

Methods: This study applies a quantitative approach by utilizing secondary data taken from the annual reports and sustainability reports of companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2017 to 2022. Using purposive sampling techniques, a total of 273 company-year observations were obtained. Panel data regression using EViews 12 was employed for data analysis.

Results: The findings show that sustainability reporting has no significant effect on tax avoidance, which implies that sustainability disclosure has not yet meaningfully shaped firms' tax conduct. However, female directors have a significant negative effect on tax avoidance, implying that board gender diversity promotes more prudent fiscal governance. The interaction variable is also significant, confirming that female directors strengthen the role of sustainability reporting in reducing tax avoidance.

Conclusion: Sustainability reporting alone is insufficient to curb tax avoidance, but its effectiveness increases when supported by female participation in corporate governance.

Abstrak

Latar Belakang: Penghindaran pajak masih menjadi persoalan global karena dapat melemahkan kapasitas fiskal negara dan akuntabilitas perusahaan. Pada sektor energi di Indonesia, struktur keuangan yang kompleks dan celah regulasi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk menerapkan strategi pajak agresif. Meskipun *sustainability reporting* diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan menekan praktik tersebut, efektivitasnya bergantung pada konfigurasi tata kelola perusahaan, terutama proporsi perempuan di jajaran direksi.

Tujuan: Riset ini ditujukan untuk menguji pengaruh *sustainability reporting* terhadap *tax avoidance* sekaligus mengeksplorasi peran dewan direksi wanita sebagai variabel moderasi.

Metode: Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2017 hingga 2022. Melalui teknik *purposive sampling*, dihimpun 273 observasi perusahaan-

tahun. Data dianalisis menggunakan regresi data panel berbantuan perangkat lunak EViews 12.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sustainability reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan keberlanjutan masih cenderung bersifat simbolis dan belum mampu memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Sebaliknya, dewan direksi wanita berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa keberagaman gender mendukung tata kelola yang lebih etis dan hati-hati. Variabel interaksi turut signifikan, mengonfirmasi bahwa dewan direksi wanita mampu memperkuat pengaruh *sustainability reporting* dalam menekan *tax avoidance*.

Kesimpulan: *Sustainability reporting* saja belum cukup untuk mengurangi *tax avoidance*, tetapi efektivitasnya meningkat ketika didukung oleh keterlibatan perempuan dalam tata kelola perusahaan.

To cite this article: Tarigan, T. M., Prasetyo, C. Y., & Setiabudi, A. W. (2026). Sustainability reporting dan tax avoidance: Peran moderasi dewan direksi wanita. *Journal of Business, Social and Technology*, 7(3), 900-911. <https://doi.org/10.59261/inkubis.v7i3.657>

PENDAHULUAN

Kapasitas fiskal negara secara fundamental ditopang oleh kepatuhan perpajakan seluruh pelaku ekonomi (Herlinanur et al., 2025). Bagi korporasi, kewajiban pajak secara langsung menekan laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Kondisi ini memotivasi manajemen untuk mencari efisiensi perpajakan, yang tidak jarang berujung pada pemanfaatan celah regulasi (*loopholes*) dalam ketentuan perpajakan demi menekan kewajiban fiskal. Konsekuensi dari strategi semacam ini tampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak negara (Chandra & Cintya, 2021).

Secara global, OECD (2023) mengestimasi kerugian fiskal akibat praktik BEPS mencapai USD 100–240 miliar per tahun, yang berdampak lebih signifikan bagi negara berkembang. Di ranah internasional, standar pelaporan keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative (GRI) serta ketentuan pengungkapan yang terhubung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB kian terintegrasi dengan aspek transparansi perpajakan. Sejumlah yurisdiksi, termasuk Uni Eropa, bahkan telah mewajibkan pelaporan publik berbasis negara per negara. Bukti empiris dari kawasan Eropa Lanis (2012) maupun Asia memperlihatkan hasil yang variatif, mengindikasikan bahwa konteks kelembagaan serta kualitas tata kelola—termasuk aspek keragaman gender pada dewan—turut memoderasi efektivitas pelaporan keberlanjutan dalam mereduksi agresivitas perpajakan.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, penerimaan perpajakan Indonesia sebelum pandemi (2017–2019) tumbuh rata-rata 7,3% per tahun dengan fluktuasi yang dipengaruhi kondisi makroekonomi dan kebijakan fiskal. Pandemi Covid-19 pada awal 2020 menyebabkan kontraksi penerimaan pajak sebesar 16,9%, mendorong pemerintah meluncurkan berbagai stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2021, penerimaan pajak mulai pulih sejalan dengan bangkitnya aktivitas ekonomi, meskipun insentif fiskal masih dipertahankan akibat ketidakpastian pandemi. Tren positif ini berlanjut hingga 2022 dengan target pertumbuhan 9,8%, walaupun realisasi penerimaan belum sepenuhnya mencapai level pra-pandemi.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada upaya legal untuk mereduksi kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan celah dalam kerangka regulasi, yang secara fundamental berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai tindakan illegal (Anindya, 2025; Luis et al., 2025). Utami (2018) mengkarakterisasi praktik ini sebagai rangkaian strategi optimalisasi posisi perpajakan yang beroperasi dalam batas-batas legalitas.

Sustainability reporting berperan sebagai instrumen komunikasi korporasi mengenai komitmen terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan (Athallah, 2026). Selain menyajikan pencapaian positif, laporan keberlanjutan juga difungsikan sebagai instrumen legitimasi terhadap potensi dampak negatif dari aktivitas bisnis perusahaan. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan perpajakan menjadi bagian integral dari tanggung jawab sosial korporasi yang mendukung pembiayaan publik, sehingga perusahaan semestinya menghindari strategi perpajakan agresif.

Meskipun demikian, Zakiyah (2025) mencatat bahwa pelaksanaan CSR dan pelaporan dalam *sustainability reporting* masih didominasi oleh motif pencitraan dan kepentingan pemegang saham. Regulasi seperti UU No. 40/2007 dan POJK No. 51/2017 kerap diperlakukan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai komitmen substansial. Kesenjangan signifikan antara idealisme *sustainability reporting* dan praktik yang berlangsung di lapangan.

Komposisi gender di level eksekutif diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi perilaku perpajakan korporasi. Peningkatan partisipasi perempuan di posisi strategis perusahaan didorong oleh agenda kesetaraan gender baik di level global maupun nasional, termasuk amanat *Sustainable Development Goal 5* serta jaminan konstitusional yang berlaku di Indonesia. Secara teoretis, perempuan umumnya dikaitkan dengan pendekatan kepemimpinan transformasional serta standar moral yang relatif lebih ketat, sehingga keterlibatan mereka dalam struktur pengambilan keputusan berpotensi mengarahkan kebijakan korporasi ke arah yang lebih konservatif dan taat regulasi, termasuk dalam konteks kebijakan perpajakan.

Meningkatnya representasi perempuan di jajaran eksekutif mendorong diversitas perspektif dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk terkait kebijakan perpajakan.

Sustainability reporting juga berperan sebagai instrumen transparansi yang memengaruhi kebijakan fiskal korporasi (Simorangkir & Machdar, 2025). Perusahaan dengan intensitas *sustainability reporting* yang komprehensif berpotensi menurunkan praktik *tax avoidance* sebagai respons terhadap tuntutan akuntabilitas (Lanis & Richardson, 2012). Meski demikian, *sustainability reporting* juga dapat dimanfaatkan sebagai tameng pencitraan (Huseynov & Klamm, 2012). Representasi perempuan di dewan direksi diprediksi mampu menguatkan relasi tersebut karena orientasi etis dan aversi risiko yang lebih tinggi (Riguen et al., 2020). Kebaruan riset ini terletak pada pengujian peran moderasi dewan direksi wanita terhadap pengaruh *sustainability reporting* terhadap *Tax Avoidance*, di mana semakin tinggi proporsi perempuan dalam dewan direksi, Oleh karena itu, kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin berkurang, khususnya pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan yang tinggi.

Studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi terkait hubungan antara *sustainability reporting* dan *tax avoidance* dengan mempertimbangkan dimensi keberagaman gender dalam dewan direksi, baik secara teoretis melalui perluasan teori legitimasi dan stakeholder, maupun secara praktis sebagai rujukan bagi korporasi, investor, dan regulator dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan kepatuhan perpajakan.

Tinjauan Literatur Dan Hipotesis

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menekankan bahwa korporasi secara aktif mengupayakan keselarasan antara praktik operasional dengan harapan masyarakat Deegan (2019), dan *sustainability reporting* menjadi salah satu instrumen kunci dalam membangun kepercayaan publik (Bini & Bellucci, 2020).

Sustainability reporting melampaui fungsinya sebagai kanal komunikasi dan juga dioperasikan sebagai strategi pengelolaan legitimasi yang diarahkan untuk mengikis pandangan negatif terhadap aktivitas korporasi, termasuk dalam dimensi perpajakan. Perusahaan dengan intensitas pengungkapan *sustainability reporting* secara intensif umumnya menghindari tindakan agresif seperti *tax avoidance* mengingat risiko kerusakan reputasi dan legitimasi yang menyertainya (Huseynov & Klamm, 2012).

Dalam kaitan ini, partisipasi perempuan pada jajaran direksi berpotensi menguatkan mekanisme legitimasi, sebab perempuan menunjukkan sensitivitas yang lebih tajam terhadap isu-isu reputasional dan etis, yang pada gilirannya mendorong korporasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori stakeholder memposisikan tanggung jawab korporasi melampaui kepentingan pemegang saham hingga mencakup pemerintah, masyarakat, dan lingkungan, di mana pajak

merupakan wujud kontribusi kepada negara (Freeman et al., 2020).

Sustainability reporting difungsikan sebagai wahana untuk menunjukkan pertanggungjawaban korporasi kepada para pemangku kepentingan melalui transparansi informasi yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Schaltegger et al., 2019). Seiring menguatnya transparansi, korporasi semakin terekspos pada tekanan stakeholder untuk mereduksi praktik *tax avoidance* yang dipandang bertentangan dengan etika dan merugikan kepentingan publik (Lanis & Richardson, 2012).

Keberadaan wanita dalam dewan direksi juga berperan penting dalam perspektif stakeholder karena perempuan memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap kepentingan jangka panjang serta kesejahteraan para pemangku kepentingan, sehingga dapat memperkuat hubungan antara *sustainability reporting* dan penurunan *tax avoidance*.

Teori Agensi (Agency Theory)

Berdasarkan teori keagenan, terdapat kemungkinan divergensi kepentingan antara manajemen selaku agen pelaksana dan pemilik selaku prinsipal dalam struktur korporasi (Taufiq et al., 2026). Dalam konteks perpajakan, *tax avoidance* dapat menjadi salah satu bentuk tindakan oportunistik manajemen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, namun juga dapat menimbulkan risiko reputasi dan biaya agensi.

Sustainability reporting dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang membatasi ruang gerak manajerial dalam melakukan *tax avoidance* secara agresif (Kovermann & Velte, 2019). Partisipasi perempuan di dewan direksi juga berpotensi meningkatkan kualitas pengawasan, mengingat perempuan umumnya menerapkan pendekatan yang lebih cermat dengan toleransi risiko yang relatif rendah. Karenanya, representasi perempuan di dewan direksi dapat mengintensifkan peran *sustainability reporting* dalam membatasi praktik *tax avoidance*.

Teori Karakteristik Manajemen (Upper Echelons Theory)

Teori upper echelons menekankan bahwa atribut personal eksekutif senior merefleksikan diri dalam keputusan strategis organisasi, termasuk kebijakan perpajakan dan pengungkapan informasi (Hambrick & Mason, 1984).

Studi empiris mengindikasikan bahwa perempuan menerapkan standar etika dan kehati-hatian yang secara relatif lebih tinggi (Riguen et al., 2020). Oleh karena itu, Kehadiran perempuan dalam dewan direksi dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan memiliki tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan yang tinggi. Oleh karena itu, dewan direksi yang terdiri dari wanita berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara laporan keberlanjutan dan penghindaran pajak.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh *Sustainability Reporting* terhadap *Tax Avoidance*

Sustainability reporting merepresentasikan transparansi korporasi atas kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya kepada para pemangku kepentingan (Hutasoit, 2025). Berdasarkan teori legitimasi dan stakeholder, perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan *sustainability reporting* yang tinggi cenderung menjaga reputasi dan memenuhi ekspektasi publik, sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan praktik yang berpotensi merugikan negara, termasuk *tax avoidance*. Bukti empiris terdahulu memperlihatkan bahwa pengungkapan CSR maupun *sustainability reporting* memiliki hubungan terbalik dengan *tax avoidance* sebagai akibat dari intensifikasi tekanan pemangku kepentingan dan penguatan mekanisme akuntabilitas (Huseynov & Klamm, 2012; Lanis & Richardson, 2012). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *sustainability reporting*, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Namun, literatur menunjukkan hasil beragam: sebagian studi menemukan hubungan negative Lanis (2012), sementara yang lain menemukan hubungan tidak signifikan atau bahkan positif (Chen et al., 2020; Huseynov & Klamm, 2012). Inkonsistensi ini menegaskan perlunya investigasi terhadap faktor kontingensi seperti representasi perempuan di dewan.

H1: *Sustainability Reporting* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Dewan Direksi Wanita terhadap *Tax Avoidance*

Keterlibatan perempuan pada level dewan direksi menjadi indikator penting dalam mekanisme tata kelola yang memengaruhi mutu proses pengambilan keputusan strategis. Perspektif upper echelons menegaskan bahwa karakteristik demografis eksekutif, termasuk gender, turut menentukan orientasi kebijakan perusahaan. Perempuan pada umumnya dicirikan oleh standar etika, sikap konservatif, dan aversi risiko yang lebih kuat, sehingga cenderung menjauhi praktik berisiko tinggi seperti *tax avoidance*. Penelitian empiris menunjukkan bahwa keberadaan direksi wanita berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perempuan lebih menekankan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi (Riguen et al., 2020). Dengan demikian, proporsi perempuan yang lebih tinggi di jajaran dewan direksi diasosiasikan dengan berkurangnya intensitas penghindaran pajak korporasi.

H2: Dewan Direksi Wanita berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Dewan Direksi Wanita sebagai variabel moderasi antara *Sustainability Reporting* dan *Tax Avoidance*

Dalam hubungan antara *sustainability reporting* dan *tax Avoidance*, partisipasi perempuan di jajaran dewan direksi dihipotesiskan memainkan peran moderasi yang mengamplifikasi pengaruh negatif dimaksud. Berdasarkan kombinasi teori legitimasi dan upper echelons theory, perempuan dalam posisi strategis cenderung lebih sensitif terhadap isu reputasi dan etika, sehingga mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengungkapkan *sustainability reporting* secara formal, tetapi juga mengimplementasikannya secara substansial dalam kebijakan perusahaan, termasuk dalam kepatuhan pajak. Literatur terdahulu mengindikasikan bahwa keberagaman gender berkontribusi pada peningkatan kualitas pengungkapan dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap kecenderungan oportunistik manajemen (Adams & Ferreira, 2009; Riguen et al., 2020). Dengan demikian, keberadaan dewan direksi wanita diharapkan memperkuat pengaruh *sustainability reporting* dalam mengendalikan praktik *tax avoidance*.

METODE

Populasi riset meliputi keseluruhan emiten sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2017–2022. Seleksi sampel mengadopsi pendekatan purposive sampling dengan penetapan kriteria spesifik. Dua kriteria utama diterapkan: (1) perusahaan sektor energi yang secara kontinu tercatat dan aktif di BEI sepanjang 2017 hingga 2022, dan (2) perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama rentang observasi 2017–2022. Penerapan kriteria tersebut menghasilkan data observasi selama enam tahun (2017–2022) mencakup 46 perusahaan, yang menghasilkan total 273 observasi.

Tabel 1. Kriteria Seleksi Sampel

Kriteria Seleksi	Jumlah Perusahaan
Perusahaan energi terdaftar di BEI selama 2017–2022	81
Dikurangi: Laporan keuangan tidak lengkap	(23)
Dikurangi: Tidak memiliki sustainability report	(12)
Perusahaan final yang memenuhi kriteria	46
Total observasi (46 perusahaan × 6 tahun)	273

Sumber: diolah penulis (2024)

Jenis dan Pengumpulan Data

Data sekunder dihimpun dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Sumber data mencakup laporan keuangan untuk variabel *tax avoidance*, data *sustainability reporting*, dan data laporan tahunan yang menggambarkan dewan direksi wanita. Data tersebut merupakan data *pooled* yang menggabungkan penggunaan data *time series* dan *cross-section*.

Definisi Operasional Variabel

***Tax Avoidance* (Y)** sebagai variabel terikat diukur dengan menggunakan (Astuti dan
Journal of Business, Social and Technology | 904

Aryani, 2017): ETR dihitung sebagai rasio beban pajak penghasilan terhadap laba pra-pajak, di mana nilai ETR yang rendah mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. CETR menangkap dimensi kas dari beban pajak kini relatif terhadap laba sebelum pajak, dengan interpretasi serupa pada arah hubungannya. Kedua proksi beroperasi pada interval 0–1; sementara itu Sustainability Reporting (X) sebagai variabel independen diukur dengan memberi skor 1 pada setiap item yang diungkapkan perusahaan dan 0 jika tidak diungkapkan berdasarkan tiga indikator, kemudian seluruh skor dijumlahkan untuk memperoleh total Sustainability Reporting (SR) yang selanjutnya dibandingkan dengan standar GRI G4 untuk menghasilkan Sustainability Reporting Index (SRI).

$$SRI = \frac{\text{Jumlah pengungkapan pelaporan keberlanjutan yang diungkapkan}}{\text{Pengungkapan pelaporan keberlanjutan GRI G4}}$$

1. **Dewan Direksi Wanita (Z)** sebagai variabel moderasi diukur menggunakan proporsi jumlah direktur wanita terhadap total anggota dewan direksi pada tahun t (Female Directors = Jumlah direktur wanita / Total anggota dewan direksi).

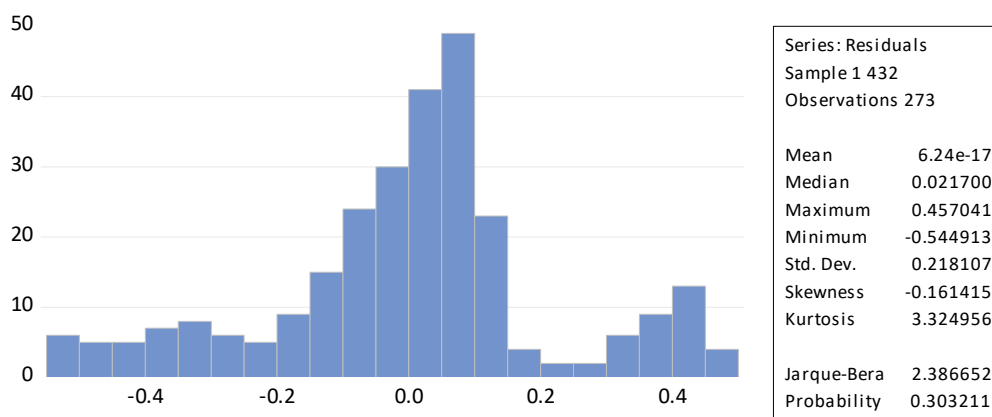
Teknik Analisis Data

berfungsi sebagai variabel independen, di mana pengukuran dilakukan dengan menganalisis setiap item yang diungkapkan oleh perusahaan berdasarkan tiga indikator tersebut. Setiap item akan diberikan nilai 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, nilai dari setiap indikator dijumlahkan untuk memperoleh total nilai Sustainability Reporting (SR) dari masing-masing perusahaan. Setelah total nilai SR diperoleh, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan pedoman standar pelaporan GRI G4 untuk mendapatkan nilai Sustainability Reporting Index (SRI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Results

Analisis Statistik Deskriptif



Gambar 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pada 273 observasi, uji normalitas residual Jarque-Bera menghasilkan probabilitas 0,303211 (> 0,05), yang mengonfirmasi distribusi normal pada residual. Nilai skewness (-0,161415) dan kurtosis (3,324956) mendukung kesimpulan bahwa distribusi residual mendekati pola normal. Model estimasi dengan demikian telah lolos uji asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors		
Date: 11/26/23 Time: 15:12		
Sample: 1 435		
Included observations: 273		
	Coefficient	Uncentered Centered

Variable	Variance	VIF	VIF
C	0.000341	1.935241	NA
LNSRI	0.003506	1.683894	1.565590
DIREKSI	0.000682	8.733744	5.059057
SRI_DIREKSI	0.000549	9.110113	5.896832

Seluruh variabel prediktor dalam model memperlihatkan nilai VIF di bawah batas kritis 10, mengkonfirmasi ketiadaan variabel independen dengan nilai $VIF \geq 10$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.854541	Prob. F(3,269)	0.1376	
Obs*R-squared	5.531938	Prob. Chi-Square(3)	0.1367	
Scaled explained SS	7.691705	Prob. Chi-Square(3)	0.0528	
Test Equation:				
Dependent Variable: LRESID2				
Method: Least Squares				
Date: 11/26/23 Time: 15:12				
Sample: 1 432				
Included observations: 273				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.548771	0.219914	-20.68429	0.0000
LNSRI	0.199664	0.705152	0.283150	0.7773
DIREKSI	-0.424781	0.311012	-1.365802	0.1731
SRI_DIREKSI	0.107005	0.279131	0.383351	0.7018
R-squared	0.020264	Mean dependent var	-4.869424	
Adjusted R-squared	0.009337	S.D. dependent var	2.624245	
S.E. of regression	2.611965	Akaike info criterion	4.772626	
Sum squared resid	1835.215	Schwarz criterion	4.825512	
Log likelihood	-647.4635	Hannan-Quinn criter.	4.793856	
F-statistic	1.854541	Durbin-Watson stat	1.733681	
Prob(F-statistic)	0.137621			

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Harvey. Statistik Obs*R-squared bernilai 5,531938 dengan probabilitas 0,1367, yang melampaui ambang signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis homoskedastisitas diterima, sehingga model tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	1.013971	Prob. F(2,269)	0.3642
Obs*R-squared	2.057663	Prob. Chi-Square(2)	0.3574

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/26/23 Time: 15:14

Sample: 1 432

Included observations: 273

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001865	0.042715	0.043653	0.9652
LNSRI	-0.000479	0.136307	-0.003518	0.9972
DIREKSI	0.000561	0.060270	0.009307	0.9926
SRI_DIREKSI	-0.001664	0.054151	-0.030721	0.9755
RESID(-1)	0.096879	0.073257	1.322459	0.1871
RESID(-2)	0.036454	0.103223	0.353155	0.7242
R-squared	0.007482	Mean dependent var	9.53E-17	
Adjusted R-squared	-0.010966	S.D. dependent var	0.504829	
S.E. of regression	0.507589	Akaike info criterion	1.503288	
Sum squared resid	69.30698	Schwarz criterion	1.582199	
Log likelihood	-200.7021	Hannan-Quinn criter.	1.534957	
F-statistic	0.405588	Durbin-Watson stat	2.143996	
Prob(F-statistic)	0.844760			

Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM menghasilkan statistik Obs*R-squared 2,057663 dengan probabilitas 0,3574, jauh melampaui ambang $\alpha = 0,05$, hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Analisis Regresi Efek Tetap (Fixed Effect Model)

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Efek Tetap (Fixed Effect Model)

Dependent Variable: LNTAX

Method: Panel Least Squares

Date: 11/25/23 Time: 20:33

Sample: 2017 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 143

Total panel (unbalanced) observations: 389

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.356512	0.063489	-21.36611	0.0022
SRI	-0.151192	0.134540	-1.123769	0.3779
DIREKSI	-0.091957	0.013668	-6.727781	0.0214
SRI_DIREKSI	-0.026297	0.002711	-9.699430	0.0105
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.608310	R-squared	0.778907	
Mean dependent var	-1.565064	Adjusted R-squared	0.646979	
S.D. dependent var	1.295376	S.E. of regression	0.769656	
Akaike info criterion	2.594378	Sum squared resid	143.9459	

Schwarz criterion	4.081994	Log likelihood	-358.6065
Hannan-Quinn criter.	3.184136	F-statistic	5.904023
Durbin-Watson stat	2.915779	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan data tabel 5, hasil analisis regresi fixed effect terbagi menjadi 3 uji yaitu:

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang telah disesuaikan (adjusted R-squared) bernilai 0,646979, mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan 64,69% variasi pada variabel dependen, sementara 35,31% residual disumbangkan oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar cakupan model.

Uji F

Pada taraf kepercayaan 95% dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 386$, F tabel bernilai 2,628 dan signifikansi model tercatat 0,000000. Dengan demikian, F hitung > F tabel ($5.904023 > 2.628$) atau nilai $p < \alpha$ ($0.000000 < 0.05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji t memperlihatkan probabilitas variabel sustainability reporting sebesar 0,3779, melebihi $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Adapun signifikansi dewan direksi wanita tercatat $0,0214 < \alpha = 0,05$, yang mengonfirmasi pengaruh dewan direksi wanita terhadap tax avoidance. Variabel interaksi (moderasi dewan direksi wanita) mencatat signifikansi 0,0105, di bawah 0,05, yang memvalidasi peran moderasi dewan direksi wanita dalam relasi sustainability reporting dan tax avoidance.

Pembahasan

Pengaruh *Sustainability reporting* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t mengindikasikan bahwa variabel *sustainability reporting* memiliki probabilitas sebesar 0,3779, melampaui tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa *sustainability reporting* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hasil ini mengisyaratkan bahwa intensitas pengungkapan keberlanjutan *sustainability reporting* yang dilakukan perusahaan belum berhasil membentuk kebijakan perpajakan yang lebih patuh.

Secara teoritis, *sustainability reporting* diharapkan mampu mengekang praktik *tax avoidance* melalui peningkatan transparansi dan penguatan pertanggungjawaban korporasi. Akan tetapi, temuan ini menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan belum mencerminkan komitmen sesungguhnya terhadap kepatuhan fiskal. Hal ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan korporasi menggunakan *sustainability reporting* sekadar sebagai alat pencitraan dan legitimasi tanpa perubahan nyata pada kebijakan perpajakan (Huseynov & Klamm, 2012). Dengan kata lain, *sustainability reporting* lebih bersifat simbolis daripada substantif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menemukan bahwa *sustainability reporting* atau CSR disclosure tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena korporasi tetap dapat menjalankan strategi minimalisasi pajak sekalipun memiliki intensitas pengungkapan yang tinggi (Chen et al., 2020). Kondisi ini mengisyaratkan kemungkinan bahwa korporasi menjalankan strategi dual: mempertahankan citra positif melalui *sustainability reporting* sambil secara simultan mengoptimalkan laba melalui *tax avoidance*.

Selain itu, lemahnya pengaruh *sustainability reporting* terhadap *tax avoidance* juga dapat disebabkan oleh faktor regulasi yang belum sepenuhnya mengikat, sehingga *sustainability reporting* masih bersifat sukarela atau formalitas semata. Kondisi ini menyebabkan *sustainability reporting* belum efektif sebagai mekanisme pengawasan terhadap perilaku perpajakan perusahaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa *sustainability reporting* belum mampu menjadi faktor penentu dalam mengendalikan praktik *tax avoidance*, sehingga diperlukan

faktor lain, seperti tata kelola perusahaan atau keberagaman gender dalam dewan direksi, untuk memperkuat efektivitasnya.

Pengaruh Dewan Direksi Wanita terhadap *Tax Avoidance*

Luaran uji t memperlihatkan bahwa variabel dewan direksi wanita memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0214, yang berada di bawah batas kritis $\alpha = 0,05$. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dewan direksi wanita berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Arah koefisien yang negatif sebesar -0.091957 mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi wanita dalam dewan direksi, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Hasil ini mendukung postulat upper echelons theory yang mengaitkan karakteristik personal pimpinan dengan arah kebijakan strategis perusahaan. Perempuan secara umum menunjukkan orientasi etis, kehati-hatian, dan toleransi risiko yang lebih konservatif, sehingga mendorong penghindaran terhadap praktik yang berpotensi merugikan perusahaan secara jangka panjang, seperti *tax avoidance* yang agresif, turut menekan ruang bagi praktik oportunistik manajerial (Riguen et al., 2020). Kehadiran mereka di jajaran direksi memperkuat fungsi pengawasan internal perusahaan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi sebelumnya yang menemukan bahwa representasi perempuan pada jajaran direksi mampu mengekang praktik penghindaran pajak, mengingat perempuan menunjukkan orientasi yang lebih kuat pada kepatuhan regulasi dan preservasi reputasi korporasi. Dengan demikian, dewan direksi wanita berperan sebagai mekanisme tata kelola yang efektif dalam mengurangi *tax avoidance*.

Peran Moderasi Dewan Direksi Wanita dalam Hubungan *Sustainability reporting* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara *sustainability reporting* dan dewan direksi wanita memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0105, berada di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dewan direksi wanita memoderasi pengaruh *sustainability reporting* terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa kendati *sustainability reporting* secara langsung secara langsung belum cukup efektif menekan praktik *tax avoidance* (H1 tidak terkonfirmasi), partisipasi perempuan di jajaran dewan direksi mampu memperkuat kapasitas *sustainability reporting* dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, *sustainability reporting* akan memiliki efektivitas lebih tinggi dalam mereduksi *tax avoidance* manakala korporasi memiliki proporsi direksi wanita yang lebih tinggi.

Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui kombinasi teori legitimasi dan upper echelons theory, di mana perempuan dalam posisi strategis cenderung lebih sensitif terhadap isu etika, reputasi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perempuan tidak hanya mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability reporting* secara formal, tetapi juga memastikan implementasinya secara substantif dalam kebijakan perusahaan, termasuk dalam kepatuhan perpajakan (Adams & Ferreira, 2009).

Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi dapat menjadi faktor kunci yang meningkatkan efektivitas *sustainability reporting* sebagai mekanisme pengendalian perilaku oportunistik perusahaan. Dengan demikian, dewan direksi wanita tidak hanya berperan secara langsung dalam menurunkan *tax avoidance*, tetapi juga berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara *sustainability reporting* dan perilaku perpajakan perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji hubungan antara *sustainability reporting* terhadap *tax avoidance* dengan dewan direksi wanita sebagai variabel moderasi. Merujuk pada hasil analisis dan validasi hipotesis, dapat ditarik simpulan bahwa *sustainability reporting* secara langsung belum mampu membatasi praktik *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *sustainability reporting* masih cenderung bersifat seremonial dan belum terinternalisasi dalam kebijakan perpajakan perusahaan.

Selanjutnya, dewan direksi wanita terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Partisipasi perempuan di jajaran dewan direksi secara efektif mampu meredam praktik penghindaran pajak, yang memvalidasi bahwa karakteristik perempuan berupa kehati-hatian, orientasi etika, dan kepatuhan regulasi berkontribusi dalam memperkuat kualitas tata kelola korporasi.

Lebih lanjut, dewan direksi wanita terbukti memoderasi hubungan antara *sustainability reporting* terhadap *tax avoidance*. Meskipun *sustainability reporting* secara langsung tidak berpengaruh signifikan, partisipasi perempuan di jajaran dewan direksi dapat mengintensifkan daya efek *sustainability reporting* dalam mengendalikan praktik *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa *sustainability reporting* melampaui dimensi formalitas dan benar-benar diaplikasikan secara konkret dalam kebijakan korporasi.

Keterbatasan riset meliputi penggunaan indeks GRI yang bersifat kuantitatif, pengukuran proporsi gender tanpa dimensi kualitatif, serta cakupan sampel yang terbatas pada sektor energi BEI 2017–2022. Riset selanjutnya disarankan menggunakan skor ESG, variabel gender yang lebih komprehensif, serta teknik estimasi yang lebih robust seperti GMM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk dukungan, masukan, maupun fasilitas bagi terlaksananya riset ini. Penghargaan khusus ditujukan kepada institusi dan pihak-pihak yang memfasilitasi akses terhadap data dan referensi yang esensial bagi penyelesaian studi ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Setiap penulis memberikan kontribusi aktif dalam pelaksanaan riset ini. Penulis pertama mengambil tanggung jawab utama dalam perumusan konsep, pengumpulan data, dan penyusunan draf naskah. Penulis kedua dan ketiga berkontribusi dalam pembimbingan, pengembangan kerangka metodologi, analisis data, validasi temuan, dan finalisasi naskah. Seluruh penulis telah menelaah, merevisi, dan memberikan persetujuan atas versi final manuskrip yang akan diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics*, 94(2), 291–309. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007>
- Anindya, P. (2025). Tax Avoidance Dan Kebijakan Pencegahannya Dalam Hukum Formal Perpajakan. *Widya Yuridika*, 8(2), 501–516.
- Athallah, F. Z. (2026). Membangun Kepercayaan Konsumen: Peran Sustainability Report dalam Meningkatkan Brand Image melalui Green Accounting. *Membangun Kepercayaan Konsumen: Peran Sustainability Report dalam Meningkatkan Brand Image melalui Green Accounting. Journal Social Society*, 6(3), 1589–1600.
- Bini, L., & Bellucci, M. (2020). Integrated sustainability reporting. *Integrated Sustainability Reporting*.
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247.
- Chen, Y., Li, W., Wang, Y., & Zhu, L. (2020). Corporate social responsibility and tax avoidance: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 62, 101579.
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in stakeholder theory. *Business & Society*, 59(2), 213–231.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206.

- Herlinanur, N., Apriyani, R., Rahmawati, P., & Pangestoeti, W. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 83–91.
- Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005>
- Hutasoit, H. R. (2025). *Analisis Penerapan Sustainability Aspek Environmental Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Kelapa Sawit Yang Terdaftar Pada Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki)*.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Luis, G. C., Nursalim, C. A., Marvela, F., & Devlim, M. A. (2025). Strategi Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan dan Upaya Pengawasannya Oleh Otoritas Pajak. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 2(3), 1–7.
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Schaltegger, S., Hörisch, J., & Freeman, R. E. (2019). Business cases for sustainability: A stakeholder theory perspective. *Organization & Environment*, 32(3), 191–212.
- Simorangkir, G. P., & Machdar, N. M. (2025). Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Green Accounting Dan Sustainability Report Terhadap Efektivitas Pajak Karbon. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 3848–3854.
- Taufiq, M., Samsul, S. P., Risnandar, M., Razak, L. A., & Amril, A. (2026). Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba: Tinjauan Literatur Sistematis Berdasarkan Teori Keagenan. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 9(2), 283–290.
- Utami, R. B. (2018). *Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Kota Malang*.
- Zakiah, A. P. (2025). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Corporate Social Responsibility Assurance Terhadap Real Earnings Management dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024*.